



DINSOS
KABUPATEN GRESIK

DDDD



RENCANA STRATEGIS

Dinas Sosial
Kabupaten Gresik

Tahun

2025-2029



dinsos.gresikkab.go.id



[dinassosialgresik](https://www.instagram.com/dinassosialgresik)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 dapat tersusun dengan baik. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Gresik dituangkan melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengacu pada PERMENDAGRI 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan adanya saran dan masukan untuk penyempurnaan pada tahapan penyusunan Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029. Apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen Renstra Tahun 2025-2026 ini. Akhir kata, semoga Dokumen Rancangan Awal Renstra Tahun 2025-2029 ini dapat bermanfaat dalam upaya pembangunan dan peningkatan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Gresik.

Gresik, September 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK



Dr. UMMI KHOIROH, M. Kes.
Pembina Tk I
NIP. 19740825 200604 2 016

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang 1
1.2	Landasan Hukum 3
1.3	Maksud dan Tujuan 8
1.4	Sistematika Penulisan 9
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD
2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 11
2.1.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 11
2.1.2	Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Gresik 17
2.1.3	Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Gresik 20
2.1.4	Kelompok Sasaran Pelayanan 34
2.1.5	Mitra PD dalam Pemberian Layanan 36
2.1.6	Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja 37
2.1.7	Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab PD 37
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 37
2.2.1	Permasalahan Layanan Perangkat Daerah 37
2.2.2	Isu Srategis 39
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1	Tujuan dan Sasaran 41
3.2	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 46
3.3	Arah Kebijakan PD dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 47
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 50
4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan 79
4.3	Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 110
4.4	Sub Kegiatan Prioritas yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029 114
4.5	Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 118

4.6	Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Renstra PD	118
4.7	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra	121
4.8	Target Keberhasilan Pencapaian IKK Renstra	125
BAB V	PENUTUP	127

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kab. Gresik	18
Tabel 2.2.	Sumber Dana Dinas Sosial Kab. Gresik	19
Tabel 2.3.	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
Tabel 2.4.	Permasalahan dan Analisis	38
Tabel 2.5	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	40
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial	43
Tabel 3.2	Pentahapan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029	45
Tabel 3.3	Strategi Dinas Sosial Tahun 2025-2029	46
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029	48
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Sosial	56
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	80
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	112
Tabel 4.4	Sub Kegiatan Prioritas yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029	115
Tabel 4.5	Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029	118
Tabel 4.6	Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Renstra PD	119
Tabel 4.7.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial	121
Tabel 4.7.2	Indikator Kinerja Daerah Dinas Sosial	123
Tabel 4.8	Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial	126

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kab. Gresik	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 disusun sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang substansinya memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, bertahap dan sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi pembangunan kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan masyarakat di Kabupaten Gresik dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Gresik yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Sosial sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik serta sekaligus menjadi langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Renstra ini di hasilkan melalui proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029 dan Program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kesinambungan Perencanaan Perangkat Daerah yang menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034.

Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan pedoman utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra Dinas Sosial. Renstra Kementerian/Lembaga ini kemudian diturunkan dan dijabarkan ke dalam RPJMN maupun RPJMD untuk memudahkan menuangkan dalam program kegiatan sesuai bidang. Dalam hubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Renstra Dinas Sosial mengidentifikasi kebutuhan pelayanan dan penanganan Pemerlu Atensi Sosial (PAS) dimana Pemerlu Atensi Sosial tersebut terdapat di semua wilayah Kabupaten Gresik. Setelah semua variabel diidentifikasi maka program dan kegiatan SKPD dapat dibuat dengan mudah dan jelas tertulis pada dokumen Renja SKPD yang dibuat setiap tahun.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial 2025-2029 juga merupakan bagian dari komitmen Dinas Sosial Kabupaten Gresik untuk mewujudkan *good governance* dan diharapkan mampu menyinergikan program pusat, provinsi, dan kabupaten serta memperkuat peran masyarakat dan lembaga sosial dalam pelaksanaan pembangunan sosial yang berkeadilan. Dengan demikian, penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 diharapkan mampu menjadi dokumen perencanaan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dan visioner. Renstra ini akan menjadi acuan dalam mewujudkan visi daerah dan menjawab tantangan sosial secara terarah terukur, dan berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

-
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah;
 15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

-
21. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 22. Peraturan Presiden No. 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs;
 23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak;
 26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

-
30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
 31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal;
 37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

-
- Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 127);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8).
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 48. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Di Kabupaten Gresik;
 49. Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
 50. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik;

-
51. Peraturan Bupati Gresik Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
 52. Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 53. Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kriteria dan Mekanisme Penetapan Penduduk Miskin di Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan untuk :

1. Pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun;
2. Menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah;
3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas pembangunan di bidang sosial, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan periode 2025-2029 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang Rencana Strategis Dinas Sosial periode 2025-2029;
5. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode 2025-2029.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 adalah untuk :

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Sosial di dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gresik;
3. Mewujudkan rencana strategis yang partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah;
5. Tercapainya efektifitas pelayanan bagi Pemerlu Atensi Sosial;
6. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah lain.

1.4 Sistematika Penulisan

Berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Uraian penjelasan umum latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Informasi tentang gambaran pelayanan (tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan termasuk capaian SPM dan kelompok sasaran layanan) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Selain itu juga terdapat permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD serta Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Target keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pengendalian, evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Gresik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, sesuai Pasal 6 huruf f Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan tipe A.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, sesuai Peraturan Bupati Gresik Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Dinas Sosial Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan perencanaan pelaksanaan urusan di bidang sosial;
- b. Penanganan permasalahan sosial melalui akselerasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan di bidang sosial;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan administrasi dan pelayanan teknis operasional urusan di bidang sosial;
- d. Penyusunan dan pengendalian pelaksanaan pedoman norma standar prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan urusan di bidang sosial;
- e. Pembinaan dan fasilitasi kepada lembaga dan/atau individu yang bergerak di bidang program penanganan masalah sosial;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan di bidang sosial; dan

-
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Gresik sebagaimana tertera dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Gresik Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Rehabilitas Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. UPT; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dan fungsi Sub Unit Kerja setingkat di bawah Kepala Dinas, berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik, adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. pengoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas;
- g. pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial yang meliputi kesejahteraan sosial anak, rehabilitasi disabel dan lanjut usia serta rehabilitasi tuna sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja upaya rehabilitasi sosial;
- b. pengendalian penyusunan dan pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta standar operasional dan prosedur penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi sosial;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan para pihak dalam upaya pelaksanaan program dan perencanaan teknis di bidang rehabilitasi sosial;
- d. perumusan sasaran dan strategi pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi sosial;

-
- e. pelaksanaan program dan kebijakan teknis pemulihan dan pengembangan rehabilitas sosial yang meliputi disabel, anak terlantar dan lanjut usia, pelayanan tuna sosial dan korban napza;
 - f. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi sosial;
 - g. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pemulihan dan pengembangan rehabilitas sosial; dan
 - i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi perlindungan sosial keluarga rentan, perlindungan sosial korban bencana alam dan/atau bencana sosial serta pengolahan data dan informasi masalah sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial;
- b. penyusunan rumusan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi perlindungan sosial keluarga rentan, perlindungan sosial korban bencana alam dan/atau bencana sosial serta pengolahan data dan informasi masalah sosial;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan teknis perlindungan sosial keluarga rentan, perlindungan sosial korban bencana alam dan/atau bencana sosial serta pengolahan data dan informasi masalah sosial;
- d. pelaksanaan koordinasi, identifikasi dan fasilitasi perlindungan sosial;

-
- e. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan rekomendasi dan/atau izin perlindungan sosial;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perlindungan sosial;
 - g. pelaksanaan koordinasi sosialisasi, pembinaan teknis, konsultasi dan fasilitasi perlindungan sosial;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan sosial; dan
 - i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial

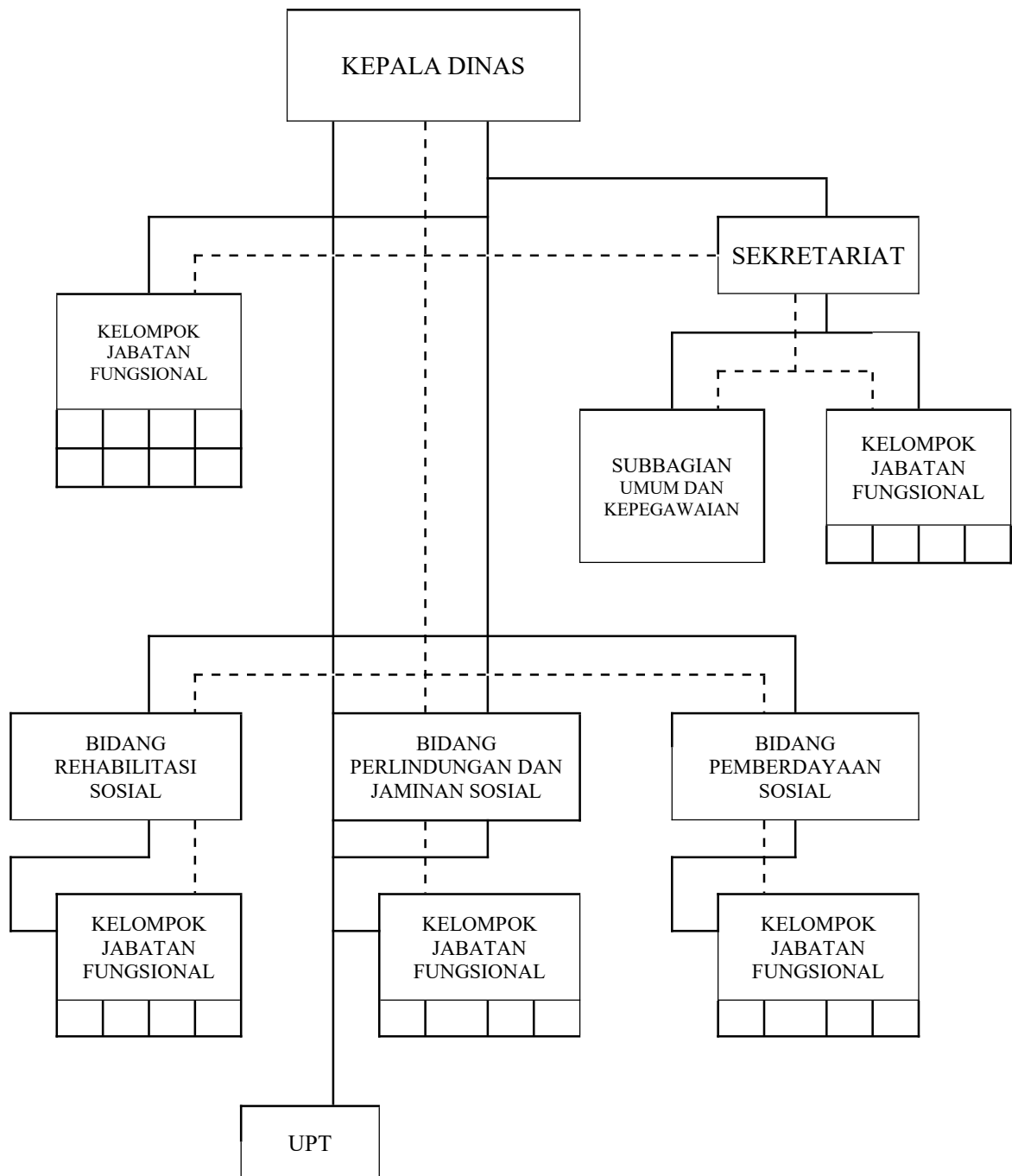
Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama Sosial mempunyai tugas melaksanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pemberdayaan sosial yang meliputi pemberdayaan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Sosial;
- b. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan pedoman petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur di bidang Pemberdayaan Sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan teknis di bidang Pemberdayaan Sosial;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;

-
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
 - g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
 - h. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan
 - i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Gresik



2.12. Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Gresik

✓ Pegawai

Sumber daya manusia yang dimiliki pada Dinas Sosial per 1 September 2025 sebanyak 54 orang yang terdiri dari 24 orang Pegawai

Negeri Sipil (PNS) 4 orang PPPK dan 26 orang Pegawai Non PNS. Bila dilihat dari jabatan yang ada di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Gresik, terdiri dari 1 (satu) orang pejabat eselon II B, 3 (tiga) orang pejabat eselon III B, 1 (satu) orang pejabat eselon IV A, 7 (tujuh) orang jabatan fungsional, 12 (dua belas) orang jabatan pelaksana, 4 (empat) orang PPPK dan 26 (dua puluh enam) staf Non PNS yang tersebar di unit kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

Dari 28 (dua puluh delapan) jumlah personel tersebut, apabila dilihat latar belakang akademis mereka, maka diperoleh gambaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Gresik
berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Kepangkatan
Per 1 September 2025

No	Uraian	Pendidikan						Jumlah
	Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Pembina Tingkat I (IV/b)						1	1
	Pembina (IV/a)						4	4
2.	Penata Tingkat I (III/d)					4	1	5
	Penata Muda Tk. I (III/b)					5		5
	Penata Muda (III/a)					3		3
3.	Pengatur Tingkat I (II/d)			1				1
	Pengatur (II/c)			1	2	1		4
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)			1				1
4.	PPPK			3		1		4
	JUMLAH			6	2	14	6	28

✓ **Sumber Dana Dinas Sosial Kabupaten Gresik**

Eksistensi Dinas Sosial secara operasional melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menangani urusan sosial dan alokasi anggaran Dinas Sosial sebagaimana terinci dalam APBD Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sumber Dana Dinas Sosial Kabupaten Gresik

No	Bidang/Urusan	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
1	Non Urusan	4.897.284.793	5.438.478.944	5.801.611.165	5.781.172.339
2	Urusan Sosial	10.519.402.600	23.979.981.652	22.111.305.190	25.988.820.955
	TOTAL	15.416.687.393	29.418.460.596	27.912.916.355	31.769.993.294

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Gresik

Tabel 2.3
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	v		v			-	>75%	>80%	>85%	>90%	-	89,97	90,66	111,12	118,96	-	119,96%	113,33%	130,73%	132,18%	
2	Persentase Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan serta Pemberdayaan PMKS		v				-	50,31	54,68	-	-	-	58,40	65,06	-	-	-	116,08%	118,98%	-	-	
3	Nilai Kabupaten Layak Lansia		v				-	75	80	-	-	-	76,1	79,5	-	-	-	101,47%	99,38%	-	-	
4	Persentase PPKS yang Terpenuhi Kebutuha Dasarnya		v				-	-	-	95%	96%	-	-	-	113,14	121,49	-	-	-	119,09%	126,55%	
5	Indks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial		v				-	-	-	78	79	-	-	-	86,54	84,43	-	-	-	110,95%	106,87%	
6	Persentase ketercapaian sasaran program OPD			v			-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7	Persentase tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja						-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						-	6	6	5	6	-	6	6	5	6	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						-	6	6	6	6	-	6	6	6	6	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						-	4	5	4	5	-	4	5	4	5	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan ASN Dinsos						-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
12	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						-	27	27	27	23	-	24	27	27	23	-	88,89%	100,00%	100,00%	100,00%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
13	Persentase penyelesaian administrasi umum						-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
14	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						-	5	7	2	1	-	5	7	2	1	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						-	50	41	8	7	-	50	41	7	7	-	100,00%	100,00%	87,50%	100,00%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
16	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						-	32	19	2	4	-	32	19	2	4	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
17	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						-	5	6	3	3	-	5	6	3	3	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
18	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						-	22	22	5	3	-	22	22	5	3	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
19	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						-	62	86	96	50	-	56	86	90	50	-	90,32%	100,00%	93,75%	100,00%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
20	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik						-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100,00%	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	pada SKPD																					
21	Persentase tercukupinya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah						-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
22	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						-	5	5	4	5	-	5	5	4	5	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
23	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						-	20	26	26	26	-	20	26	26	26	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
24	Persentase pemeliharaan barang milik daerah						-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
25	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						-	5	7	13	9	-	5	7	13	9	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
26	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						-	3	3	37	30	-	3	3	37	30	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
27	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
28	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina			v			-	92,40	92,91	93,67	96,20	-	110,13	123,80	95,95	98,48	-	119,19%	133,25%	102,43%	102,37%	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
29	Persentase Data Urusan Sosial yang dimutakhirkan			v			-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
30	Persentase Puskesmas yang terbentuk			v			-	19,18	41,09	54,79	73,97	-	14,79	14,79	97,19	97,19	-	77,11%	35,99%	177,39%	131,39%	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
31	Persentase PSKS yang terbina						-	80	84,93	84,93	95,89	-	89,04	132,88	100	106,58	-	111,30%	156,46%	117,74%	111,15%	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
32	Jumlah PSKS yang difasilitasi						-	-	-	13	13	-	-	-	13	13	-	-	-	100,00%	100,00%	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
33	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan						-	100	80	40	40	-	100	80	40	40	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Kabupaten/Kota																					Kabupaten/Kota
34	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota						-	18	18	18	18	-	18	18	18	18	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
35	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota						-	80	9750	13	13	-	80	9303	13	13	-	100,00%	95,42%	100,00%	100,00%	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
36	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota						-	75	13	1	1	-	75	13	1	1	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
37	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi			v			-	0,25	0,28	0,29	0,33	-	0,78	0,40	0,42	0,63	-	312,00%	142,86%	144,83%	190,91%	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
38	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial			v			-	2,10	2,24	2,38	2,52	-	2,66	3,23	3,26	3,89	-	126,67%	144,20%	136,97%	154,37%	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	diluar panti																					
39	Persentase Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lansia Terlantar yang tertangani						-	1,31	0,31	1,37	1,38	-	26,66	0,33	1,39	3,88	-	2035,11%	106,45%	101,46%	281,16%	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
40	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang direhabilitasi						-	-	-	25717	28278	-	-	-	25165	27559	-	-	-	97,85%	97,46%	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
41	Nilai Kabupaten Layak Lansia						-	-	-	77	78	-	-	-	86,84	89,70	-	-	-	112,78%	115,00%	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
42	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan				v	v	-	28	25	29	32	-	28	25	29	27	-	100,00%	100,00%	100,00%	84,38%	Penyediaan Alat Bantu

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Kewenangan Kabupaten/Kota																					
43	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				v	v	-	37421	25120	25355	27961	-	35901	24176	24803	27283	-	95,94%	96,24%	97,82%	97,58%	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
44	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				v	v	-	35	165	165	100	-	35	165	165	67	-	100,00%	100,00%	100,00%	67,00%	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
45	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				v	v	-	25	45	50	100	-	25	45	50	108	-	100,00%	100,00%	100,00%	108,00%	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
46	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				v	v	-	25	60	25	25	-	25	60	25	16	-	100,00%	100,00%	100,00%	64,00%	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Kewenangan Kabupaten/Kota																					Dasar
47	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				v	v	-	30	35	93	60	-	30	35	93	58	-	100,00%	100,00%	100,00%	96,67%	Pemberian Layanan Rujukan
48	Persentase Rehabilitasi WTS, ODGJ dan Gepeng yang tertangani						-	0,35	0,14	0,39	0,41	-	0,19	0,16	0,37	0,59	-	54,29%	114,29%	94,87%	143,90%	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
49	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi						-	-	-	235	715	-	-	-	235	803	-	-	-	100,00%	112,31%	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
50	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				v	v	-	-	-	25	200	-	-	-	25	224	-	-	-	100,00%	112,00%	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
51	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan				v	v	-	110	100	100	200	-	100	100	100	201	-	90,91%	100,00%	100,00%	100,50%	Pemberian Layanan Kedaruratan

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota																					
52	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				v	v	-	90	40	40	275	-	90	36	40	206	-	100,00%	90,00%	100,00%	74,91%	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
53	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				v	v	-	70	83	70	170	-	70	83	70	172	-	100,00%	100,00%	100,00%	101,18%	Pemberian Layanan Rujukan
54	Persentase Keluarga Terdaftar DTKS yang mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial			v			-	36,09	38,72	42,87	44,25	-	37,11	69,74	55,67	64,38	-	102,83%	180,11%	129,86%	145,49%	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
55	Persentase Panti Asuhan yang terpelihara						-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
56	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota						-	-	-	150	192	-	-	-	150	35	-	-	-	100,00%	18,23%	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
57	Persentase data DTKS yang dinyatakan valid oleh Kementerian Sosial						-	-	-	95	95	-	-	-	95	100	-	-	-	100,00%	105,26%	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
58	Persentase data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang dipadankan dengan data DTKS						-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100,00%	100,00%	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
59	Tingkat Kematangan Layanan Publik						-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	150,00%	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
60	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata						-	-	-	520000	539697	-	-	-	559422	539697	-	-	-	107,58%	100,00%	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
61	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota						-	-	-	45000	85619	-	-	-	49922	85619	-	-	-	110,94%	100,00%	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
62	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						-	-	-	4727	6551	-	-	-	3697	4220	-	-	-	78,21%	64,42%	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
63	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Oleh Tagana			v			-	75,95	85,95	85,95	95,95	-	63,43	97,12	100,46	69,32	-	83,52%	113,00%	116,88%	72,25%	PROGRAM PENANGANAN BENCANA

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
64	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan permakanaan dan dukungan psikososial						-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
65	Persentase keluarga rentan yang mendapatkan penanganan						-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100,00%	100,00%	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
66	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota						-	4	5	4	10000	-	4	5	4	6750	-	100,00%	100,00%	100,00%	67,50%	Penyediaan Makanan
67	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota						-	43	40	35	30	-	16	28	35	30	-	37,21%	70,00%	100,00%	100,00%	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
68	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota						-	-	-	68	152	-	-	-	68	152	-	-	-	100,00%	100,00%	Pelayanan Dukungan Psikososial

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
69	Persentase Tagana yang terbina						-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
70	Persentase Tagana yang difasilitasi						-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100,00%	100,00%	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
71	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota						-	30	35	37	40	-	30	35	37	40	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
72	Persentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi			v			-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
73	Persentase TMP yang terpelihara						-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
74	Jumlah TMP yang dipelihara dan						-	-	-	11	11	-	-	-	11	11	-	-	-	100,00%	100,00%	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian					Keterangan
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	direhabilitasi																					Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
75	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						-	2	11	0	1	-	2	11	0	1	-	100,00%	100,00%	-	100,00%	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
76	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota						-	11	11	11	11	-	11	11	11	11	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
77	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100,00%	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Sosial Kabupaten Gresik memberikan pelayanan kepada Pemerlu Atensi Sosial agar setiap layanan yang diberikan tepat sasaran dan mampu menjawab permasalahan atau kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, program yang disusun menjadi lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerlu Atensi Sosial (PAS) yaitu individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal karena hambatan atau gangguan, sehingga membutuhkan pelayanan dan dukungan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar, jasmani, rohani, dan sosial mereka secara wajar. Kategori kelompok masyarakat yang menjadi prioritas utama, yaitu:

1. Fakir miskin;
2. Anak-anak rentan (Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak Berhadapan Hukum, Anak Difabel, Anak Korban Tindak kekerasan, Anak Jalanan, Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus);
3. Difabel;
4. Lansia Terlantar;
5. Mereka yang berpendapatan rendah (Gelandangan, Pengemis, Pemulung);
6. Korban bencana;
7. Kelompok Afirmatif (Komunitas Adat Terpencil);
8. Warga Binaan;
9. Korban kekerasan (Korban Tindak Kekerasan, Korban Trafficking, Pekerja Migran Bermasalah Sosial);
10. Korban Napza dan HIV/AIDS;
11. Mereka yang bermasalah sosial (Kelompok Minoritas, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis);
12. Perempuan Rentan (Perempuan yang Rawan Ekonomi dan Tuna Susila).

Kebutuhan utama dari kelompok sasaran tersebut meliputi kebutuhan dasar seperti bantuan pangan atau makanan dan bantuan langsung tunai yang bisa digunakan oleh penerima manfaat untuk mencukupi kebutuhan pokok lainnya. Selain itu juga terdapat layanan guna meningkatkan keberfungsian sosial meliputi bantuan alat bantu bagi disabilitas dan lanjut usia, pelatihan keterampilan usaha dan modal usaha untuk mendukung kemandirian. Dinas Sosial juga melakukan pemberian perlindungan sosial bagi Pemerlu Atensi Sosial seperti pemeriksaan kesehatan, rehabilitasi dan dukungan keluarga. Dinas Sosial ikut serta dalam melaksanakan SPM Posyandu bidang Sosial melalui dukungan : (i) Komunikasi, informasi dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana dan inklusi sosial; (ii) Identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan (iii) Memfasilitasi dan menyalurkan bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diharapkan dengan adanya layanan yang diberikan kepada Pemerlu Atensi Sosial dapat berdampak positif yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik.

Selain Pemerlu Atensi Sosial, kelompok sasaran layanan Dinas Sosial adalah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PSKS adalah individu, kelompok atau masyarakat yang berpartisipasi dan berkontribusi dalam upaya menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi :

1. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
3. Taruna Siaga Bencana (Tagana);
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
5. Karang Taruna;
6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

Dinas Sosial melakukan pembinaan dan pelatihan secara rutin kepada anggota PSKS untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi dan pemahaman terbaru mengenai isu-isu sosial dan pendekatan penanganan sosial. Dinas Sosial memberikan motivasi kepada para PSKS untuk tetap semangat dan berdedikasi dalam menjalankan tugasnya, membentuk pola pikir yang positif dan membangun jiwa sosial yang kuat agar PSKS dapat terus ikhlas dan tulus dalam melayani masyarakat. Dinas Sosial juga melakukan pengawasan secara berkala terhadap kinerja PSKS di lapangan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku, melakukan evaluasi laporan kerja PSKS untuk mengukur efektivitas program dan layanan yang telah diberikan serta menggunakan hasil evaluasi untuk membuat kebijakan atau program pembinaan yang lebih tepat sasaran di tahun selanjutnya.

2.1.5 Mitra PD dalam Pemberian Layanan

Dalam pelaksanaan pemberian layanan kepada masyarakat, Dinas Sosial bekerja sama dengan beberapa Perangkat Daerah seperti :

1. Dinas Kesehatan dalam rangka verifikasi data penerima bantuan iuran PBI-JK, pembiayaan penanganan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum memiliki identitas kependudukan, penanganan Stunting dan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ;
2. Dinas Satpol PP dalam rangka penjemputan, pengiriman dan pemulangan klien dari dan ke UPT milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan ke RSJ Menur ;
3. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka pengaduan masyarakat terkait penanganan Pemerlu Atensi Sosial melalui Call Center 112 ;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka verifikasi dan validasi data secara rutin untuk data kependudukan ;

-
5. Dinas Pendidikan dalam rangka data calon penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), persiapan kegiatan Petirahan Anak dan Kolaborasi untuk mendukung Program Prioritas Asta Cita Sekolah Rakyat ;
 6. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka perlindungan perempuan dan anak serta penanganan Stunting ;
 7. Dinas Tenaga Kerja dalam rangka pelatihan ketenagakerjaan untuk masyarakat miskin dan penanganan Pekerja Migran Indonesia ;
 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam rangka pemberian analisa terkait adanya dampak sosial bagi pembangunan infrastruktur ;
 9. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka bedah Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat miskin ;
 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka mitigasi bencana dan penanganan rehabilitasi sosial pasca bencana ;
 11. Desa dan Kelurahan di Kabupaten Gresik dalam rangka verifikasi dan validasi DTSEN dan updating data SIKS-NG;
 12. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam rangka pelatihan keterampilan untuk kemandirian Pemerlu Atensi Sosial ke UPT.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD

Tidak terdapat dukungan dari BUMD dalam Pencapaian Kinerja.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab PD

Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat, Dinas Sosial bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia dan Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yang meliputi Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan Bank BTN.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan perangkat daerah merupakan penjabaran dari identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kinerja Dinas

Sosial dalam melaksanakan fungsi identifikasi permasalahan, perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, monitoring serta evaluasi program sosial. Rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan adanya kesenjangan antara standar kualitas pelayanan perencanaan yang diharapkan dengan capaian aktual yang diperoleh. Identifikasi dilakukan terhadap seluruh aspek pelayanan yang menjadi kewenangan Dinas Sosial.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Gresik sesuai dalam aspek sosial antara lain:

Tabel 2.4
Permasalahan dan Analisis

No	Permasalahan	Analisis
1	Terbatasnya kemampuan perangkat daerah dalam menyediakan aksesibilitas serta sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam penanganan Pemerlu Atensi Sosial	Layanan sosial bagi Pemerlu Atensi Sosial (PAS) seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, dan korban kekerasan belum sepenuhnya dapat diakses secara merata karena keterbatasan sarana, prasarana, serta fasilitas yang ramah kelompok rentan. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial, belum adanya standar pelayanan minimal yang sepenuhnya diterapkan dalam penyediaan fasilitas sosial dan rendahnya koordinasi antarperangkat daerah dalam penyediaan fasilitas terpadu bagi PAS.
2	Masih kurangnya kemampuan dan kompetensi SDM yang memadai dalam rangka penanganan Pemerlu Atensi Sosial	Sebagian aparatur dan tenaga pendamping sosial belum memiliki kompetensi teknis dan keahlian khusus dalam melakukan asesmen, intervensi, dan rehabilitasi sosial bagi PAS. Hal ini disebabkan terbatasnya pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM bidang kesejahteraan sosial, belum meratanya tenaga profesional seperti pekerja sosial atau psikolog di tingkat daerah serta

No	Permasalahan	Analisis
		kurangnya sistem pembinaan berkelanjutan bagi SDM pelaksana layanan sosial.
3	Masih kurangnya validitas dan akurasi data Pemerlu Atensi Sosial	Basis data Pemerlu Atensi Sosial belum sepenuhnya mutakhir dan terintegrasi, sehingga seringkali terjadi perbedaan data antar instansi maupun wilayah. Penyebabnya dapat berasal dari mekanisme pendataan dan verifikasi belum berjalan secara periodik dan berstandar, kurangnya integrasi data antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem informasi kesejahteraan sosial.
4	Rendahnya Partisipasi dan Literasi Masyarakat terhadap Program-Program Dinas Sosial	Tingkat pemahaman, kepedulian, dan keterlibatan masyarakat dalam program sosial masih rendah, baik dalam kegiatan pencegahan, penanganan, maupun pemberdayaan sosial. Hal ini disebabkan sosialisasi program yang belum masif dan berkelanjutan dan kurangnya kolaborasi dengan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media dalam mendukung kegiatan sosial.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau fenomena yang sangat penting dan memiliki dampak signifikan serta jangka panjang pada tujuan perangkat daerah dan memerlukan prioritas penanganan. Fungsi dari penentuan isu strategis adalah menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, membantu menentukan arah dan prioritas pembangunan agar lebih tepat sasaran dan akuntabel dan menghindari kerugian dan memanfaatkan peluang yang ada demi peningkatan layanan kepada masyarakat.

Tabel 2.5
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

No	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	Jaringan koperasi, UMKM, ekonomi pesantren, serta pasar terbuka melalui pelabuhan dapat menjadi motor pengentasan kemiskinan	Terbatasnya Dinas Sosial dalam menyediakan aksesibilitas serta sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam penanganan Pemerlu Atensi Sosial	Penanggulangan Kemiskinan	Konflik internasional	Peningkatan Kesempatan Kerja	Penanggulangan Kemiskinan	Belum optimalnya pelayanan dan penanganan Pemerlu Atensi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
2		Masih kurangnya kemampuan dan kompetensi SDM yang memadai dalam rangka penanganan Pemerlu Atensi Sosial					Peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM pada Dinas Sosial melalui pelatihan keterampilan Penanganan Pemerlu Atensi Sosial
3		Masih kurangnya validitas dan akurasi data Pemerlu Atensi Sosial					Verifikasi dan validasi data Pemerlu Atensi Sosial secara rutin agar pemberian bantuan sosial tepat sasaran dan sesuai dengan
4		Rendahnya partisipasi dan literasi masyarakat terhadap program-program Dinas Sosial					Peningkatan kemampuan dan kompetensi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai mitra kerja Dinas Sosial untuk melaksanakan sosialisasi dan kegiatan penanganan masalah sosial

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur yang akan dicapai sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai / diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi.

Visi Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah :

“Pembangunan Gresik Maju yang Berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Penjabaran visi tersebut dapat diuraikan dimana Pembangunan Gresik Maju mencerminkan Kabupaten Gresik untuk menjadi daerah yang berkembang secara dinamis, inovatif, dan berdaya saing dalam berbagi sektor tidak hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang modern serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Berkelanjutan dalam visi pembangunan Kabupaten Gresik menekankan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan yang berakar pada prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep Pusat Pertumbuhan Ekonomi menegaskan peran strategis daerah sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat regional maupun nasional, mengingat Kabupaten Gresik merupakan salah satu Kabupaten Industri Utama di Jawa Timur dalam sektor manufaktur, maritim, pertanian serta perdagangan dan jasa. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari setiap proses pembangunan. Kesejahteraan tidak hanya diartikan sebagai peningkatan ekonomi semata,

tetapi juga mencakup aspek sosial, pendidikan, kesehatan dan pemerataan pembangunan. Konsep ini mengacu pada prinsip keadilan sosial, dimana setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, akses terhadap layanan dasar serta peluang untuk berkembang secara ekonomi dan sosial.

Dinas Sosial mengacu pada Misi Pertama yaitu “Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah” dan Misi Kelima yaitu “Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar”. Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik maka indikator sasaran RPJMD pada urusan Sosial menjadi indikator Tujuan Renstra Dinas sosial 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	BASELINE 2024	Target						Keterangan
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial		Indeks Inklusi (GEDSI)				56,2	60	64	68	72	76	80	Sasaran RPJMD
Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan			Rasio Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin				80-95	80-95	85-95	90-95	95-100	95-100	95-100	Sasaran RPJMD
Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi			Rasio Gini				0,33	0,311-0,351	0,303-0,343	0,295-0,335	0,287-0,327	0,279-0,319	0,271-0,311	Sasaran RPJMD
		Meningkatkan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh kelompok rentan	Persentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan	√	√		28%	28%	37%	45%	53%	60%	67%	Sasaran Dinas Sosial

		Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan perlindungan sosial dan inklusi sosial bagi kelompok rentan dan marginal	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial sektoral	√	√		3%	N/A	3%	5%	7%	8%	8%	Sasaran Dinas Sosial
			Persentase penyandang disabilitas yang mendapat Program Perlindungan Sosial	√	√		15%	16%	27%	29%	38%	48%	57%	Sasaran Dinas Sosial
			Persentase Lansia Miskin yang mendapat Program Perlindungan Sosial	√	√		18%	22%	30%	37%	43%	50%	57%	Sasaran Dinas Sosial
		Mewujudkan pengurangan ketimpangan	Persentase Desil 1-2 dibandingkan dengan jumlah penduduk	√	√		21%	20%	19%	18%	17%	16%	15%	Sasaran Dinas Sosial

Pentahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi Persiapan, Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Penyempurnaan Rancangan Renstra PD menjadi Rancangan Akhir, dan Penetapan Renstra PD. Dokumen ini merupakan penjabaran dari RPJMD dan berisi strategi serta arah kebijakan perangkat daerah untuk periode lima tahun, selaras dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

TAHAP 1 2026	TAHAP 2 2027	TAHAP 3 2028	TAHAP 4 2029	TAHAP 5 2030
Penguatan Basis Data Sosial melalui pemutakhiran DTSEN dan Gresik Soya	Pemberdayaan dan pelatihan keterampilan serta Bantuan modal usaha	Penguatan kelembagaan sosial dan sinergi program sosial	Integrasi layanan sosial melalui pengembangan sistem informasi layanan sosial berbasis digital	Evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja dan penyusunan keberlanjutan program sosial
Pentahapan Renstra				
Penguatan Basis Data Sosial melalui pemutakhiran DTSEN dan Gresik Soya guna Penanganan Kemiskinan melalui bantuan sosial tepat sasaran	Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Rentan melalui pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi keluarga miskin dan Bantuan modal usaha untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan sosial	Pembinaan, Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial sebagai mitra kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial	Integrasi layanan sosial melalui pengembangan sistem informasi berbasis digital melibatkan penggunaan teknologi untuk menyatukan dan mempermudah akses layanan sosial seperti sistem informasi terpadu dan portal pelayanan publik, demi meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan	Evaluasi komprehensif terhadap capaian kinerja melalui analisis capaian program dengan meninjau indikator keberhasilan, dampak, kesenjangan, efisiensi dan efektivitas serta faktor pendukung dan penghambat

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Perumusan strategi dalam Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 merupakan pendekatan strategis yang dirancang secara komprehensif untuk memastikan tercapainya tujuan Dinas Sosial “Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan yang Berwawasan Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial”. Selain itu, rumusan strategi juga digunakan untuk menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Gresik menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan, terutama bagi layanan langsung pada masyarakat. Adapun strategi Dinas Sosial Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Strategi Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

No	Misi	Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi
1	Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial	Meningkatkan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh kelompok rentan	Memperkuat sistem registrasi sosial-ekonomi untuk penargetan yang lebih baik, membangun mekanisme perlindungan sosial adaptif dan terintegrasi, serta meningkatkan akses kelompok rentan terhadap pelayanan kebutuhan dasar

No	Misi	Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi
2	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan		Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan perlindungan sosial dan inklusi sosial bagi kelompok rentan dan marginal	Pendekatan partisipatif dan inklusif, pengembangan kapasitas dan peningkatan keberdayaan kelompok rentan dan marginal, pengembangan kegiatan perekonomian, kolaborasi lintas sektor, penyediaan akses layanan, serta advokasi kebijakan dan ruang publik yang aman bersifat komprehensif
		Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi		Mewujudkan pengurangan ketimpangan	Optimalisasi penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan program-program unggulan kemiskinan dan pemutakhiran data

Setiap strategi yang disusun selanjutnya diturunkan ke dalam arah kebijakan yang menjadi pedoman operasional. Arah kebijakan memberikan fokus dan kejelasan implementatif terhadap strategi yang dipilih, sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat lebih terarah, terukur, dan akuntabel.

3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas atau pedoman strategis yang menjadi dasar untuk merumuskan dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam suatu periode tertentu, untuk mencapai sasaran dan mewujudkan tujuan Perangkat Daerah serta memastikan pelaksanaan yang sinergis antar berbagai program yang digunakan untuk meningkatkan kinerja, melakukan reformasi, dan memperbaiki proses

pelaksanaan program, baik dalam pelayanan maupun administrasi. Arah kebijakan menunjukkan fokus prioritas pembangunan yang harus dicapai dari waktu ke waktu selama periode perencanaan.

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik
Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS SOSIAL	KET
1	2	3	4	5
1	Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, meliputi penyusunan kebijakan dan perencanaan, pengelolaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pembinaan teknis dan fasilitasi terhadap seluruh kegiatan sosial di wilayah Kabupaten Gresik sesuai ketentuan perundang-undangan	Perluasan dan penguatan sistem perlindungan sosial yang menjangkau seluruh kelompok rentan melalui layanan dasar yang terintegrasi dan akses yang adil terhadap bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi	Mengintegrasikan berbagai program perlindungan sosial layanan dasar untuk memastikan cakupan yang lebih luas dan merata bagi kelompok rentan	
2		Integrasi perlindungan sosial dengan program peningkatan produktivitas ekonomi rumah tangga miskin melalui dukungan terhadap UMKM, pelatihan kerja, dan akses ke sektor formal dan informal yang inklusif	Mengintegrasikan program bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi melalui graduasi penerima manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri dan pelatihan keterampilan serta akses permodalan (bantuan modal usaha)	
3		Penguatan tata kelola perlindungan sosial berbasis data terpadu, transparansi dalam perencanaan dan pengawasan, serta akuntabilitas distribusi bantuan sosial dan layanan berbasis sistem yang terintegrasi lintas lembaga	Penguatan tata kelola Data Tunggal Sosial Ekonomi dan Nasional (DTSEN) melalui pembaruan data secara berkala dengan verifikasi dan validasi lapangan serta pendistribusikan bantuan sosial secara non-tunai	
4		Penjaminan hak-hak sosial kelompok rentan dan miskin melalui regulasi yang melindungi, serta penguatan kontrol sosial dan pengawasan partisipatif untuk mencegah ketimpangan distribusi dan diskriminasi dalam program perlindungan sosial	Menynergikan berbagai regulasi terkait jaminan sosial, bantuan sosial, dan layanan sosial untuk memperkuat perlindungan bagi kelompok miskin dan rentan dan koordinasi lintas sektor	

NO	OPERASIONALISASI NPSK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS SOSIAL	KET
5		Pemberdayaan komunitas lokal dan penguatan solidaritas sosial dalam membangun jejaring perlindungan sosial berbasis budaya gotong royong dan nilai-nilai kearifan lokal	Kolaborasi, fasilitasi, dan penguatan kelembagaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	
6		Pemerataan jangkauan program perlindungan sosial di seluruh wilayah termasuk desa-desa terpencil melalui pemetaan berbasis spasial dan kebijakan afirmatif untuk wilayah yang tertinggal atau rawan sosial	Identifikasi, analisis dan updating Data Tunggal Sosial Ekonomi dan Nasional (DTSEN) bersama Desa/Kelurahan dan melibatkan peran serta aktif masyarakat	
7		Dukungan infrastruktur layanan sosial dasar yang memadai di tingkat lokal untuk mendukung efektivitas implementasi perlindungan sosial, seperti pusat layanan terpadu, transportasi, dan digitalisasi akses informasi program	Pengembangan dan fasilitasi Pusat Layanan Terpadu (Puskesmas) yang terhubung dengan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi dan Nasional (DTSEN) dan Gresik Soya	
8		Penyusunan roadmap jangka panjang perlindungan sosial yang responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk peningkatan kualitas dan dampak program secara konsisten	Menyusun program yang bisa beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi, serta memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat serta evaluasi berkala dan partisipatif	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029

Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan khususnya pada bidang urusan sosial, diperlukan rencana pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta kerangka pendanaan pada periode Tahun 2025-2029. Pada sub bab ini dibahas mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Program Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gresik. Program merupakan sebuah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dalam hal ini juga telah di turunkan menjadi Sub kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Mengacu pada Peraturan dan Keputusan tersebut, maka Dinas Sosial sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mengampu program pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjabarkan 6 program urusan sosial dan 1 program penunjang urusan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

yang merupakan mitra kerja Dinas Sosial dalam rangka pelayanan dan penanganan Pemerlu Atensi Sosial, meliputi kegiatan :

I. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

II. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- 3) Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini berfungsi untuk memfasilitasi pemulangan dan rehabilitasi korban migran dari titik debarkasi ke daerah asal, serta menyediakan bantuan sosial dan perlindungan lainnya untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis mereka dan mengembalikan korban agar dapat berfungsi kembali dalam masyarakat secara sosial dan ekonomi setelah mengalami kekerasan yang meliputi kegiatan :

I. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, dengan didukung dengan Sub Kegiatan :

- 1) Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

3. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, dengan memberikan pelayanan, bantuan sosial dan rehabilitasi sosial agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat, yang meliputi kegiatan :

I. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pelatihan Keterampilan bagi PMKS, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Alat Bantu
- 2) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- 3) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
- 4) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- 5) Pemberian Layanan Rujukan

II. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Penanganan PMKS, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemberian Layanan Kedaruratan
- 2) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- 3) Pemberian Layanan Rujukan

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan untuk memberikan perlindungan dan Jaminan terhadap Keluarga Rentan, Fakir Miskin, Anak-anak Panti Asuhan dan pendataan yang valid guna penyaluran Bantuan Sosial tepat sasaran yang meliputi kegiatan :

I. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Penjangkauan Anak-Anak Terlantar

II. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

2) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

3) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan untuk penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial (penanganan Mr. X, pemulangan Orang Terlantar) serta koordinasi Anggota Taruna Siaga Bencana, yang meliputi kegiatan berikut:

I. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan Makanan

2) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

3) Pelayanan Dukungan Psikososial

II. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan untuk pengelolaan Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Gresik yang meliputi kegiatan :

I. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

-
- 1) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - 2) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk menunjang Operasional, SDM dan mekanisme kerja di lingkungan Dinas Sosial mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan, yang meliputi Kegiatan :

- I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1)Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2)Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3)Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1)Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- III. Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1)Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2)Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3)Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4)Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5)Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6)Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7)Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- IV. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

-
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- V. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sebagai upaya memastikan keterkaitan yang logis dan konsisten antara dokumen RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD), maka seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dirumuskan perlu dianalisis dan disusun secara sistematis dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta sasaran RPJMD yang relevan. Rincian program dan sub kegiatan yang telah disusun sebelumnya dalam dokumen ini selanjutnya dipetakan kembali dalam bentuk tabel analitis yang mengaitkan antara NSPK, tujuan dan sasaran Rencana Strategis, serta hasil yang ingin dicapai (outcome dan output). Adapun pemetaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan disajikan dalam Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan
Renstra Dinas Sosial Kab. Gresik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL							
- Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa - Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan - Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial				Indeks inklusi (GEDSI) (Indeks)		
					Rasio Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin (%)		
					Rasio gini (Angka)		
		Meningkatkan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh kelompok rentan			Persentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan (%)		
			Meningkatnya penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (%)	1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
				Meningkatnya fasilitas bagi Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan dan tertangani	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
					Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.03.2.01.0003 - Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
			Meningkatnya pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Indeks (Skala 0-100))	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Indeks (Skala 0-100))	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan	
				Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0013 - Pemberian Layanan Rujukan	
			Meningkatnya penanganan bencana bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
					Persentase Korban Bencana yg Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
					Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya (%)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
			Terwujudnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
				Terselenggaranya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
		Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan perlindungan sosial dan inklusi sosial bagi kelompok rentan dan marginal			Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial sektoral (%)		
					Persentase penyandang disabilitas yang mendapat Program Perlindungan Sosial (%)		
					Persentase Lansia Miskin yang mendapat Program Perlindungan Sosial (%)		
			Meningkatnya ketercapaian sasaran Program OPD		Persentase ketercapaian sasaran program OPD (%)	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial		Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
					Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi dalam Pelayanan Sosial (%)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
					Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang memiliki sertifikasi (%)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
				Terselenggaranya Pengembangan Kapasitas bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)	1.06.02.2.03.0017 - Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Indeks (Skala 0-100))	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Dasarnya (%)	SOSIAL	
					Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Indeks (Skala 0-100))	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan	
				Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0013 - Pemberian Layanan Rujukan	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi Fakir Miskin		Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Indikator Persentase Penerima Manfaat yang diberikan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase penyaluran perlindungan sosial sektoral (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase Desa dan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan fakir miskin (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase penerima manfaat yang diberikan perlindungan dan jaminan sosial sektor kesehatan (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase penerima manfaat yang diberikan perlindungan dan jaminan sosial sektor pendidikan (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase penyaluran perlindungan sosial sektor pangan (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Terselenggaranya Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar di Panti Asuhan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
				Terselenggaranya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0004 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
		Mewujudkan pengurangan ketimpangan			Persentase Desil 1-2 dibandingkan dengan jumlah penduduk (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi Fakir Miskin		Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Indikator Persentase Penerima Manfaat yang diberikan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase penyaluran perlindungan sosial sektoral (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase Desa dan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan fakir miskin (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase penerima manfaat yang diberikan perlindungan dan jaminan sosial sektor kesehatan (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase penerima manfaat yang diberikan perlindungan dan jaminan sosial sektor pendidikan (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase penyaluran perlindungan sosial sektor pangan (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Terselenggaranya Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar di Panti Asuhan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					(Orang)		
				Terselenggaranya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan merupakan dokumen perencanaan yang merinci program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta perkiraan pendanaan untuk mencapai tujuan strategis organisasi dan dilengkapi indikator kinerja serta sumber dana. Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan dan pengendalian kinerja, serta menjadi bagian dari dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

TABEL 4.2
Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				25.433.365.000,00		26.187.660.000,00		27.149.307.000,00		28.509.408.000,00		29.379.766.000,00		
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.693.332.000,00		6.281.762.000,00		6.512.437.000,00		6.838.691.000,00		7.047.468.000,00		
Meningkatnya ketercapaian sasaran Program OPD	Persentase ketercapaian sasaran program OPD (%)	100	100	5.693.332.000,00	100	6.281.762.000,00	100	6.512.437.000,00	100	6.838.691.000,00	100	7.047.468.000,00	1.06.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				37.074.829,00		48.500.000,00		51.100.000,00		53.300.000,00		55.700.000,00		
Terselenggaranya Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	37.074.829,00	5	48.500.000,00	5	51.100.000,00	5	53.300.000,00	5	55.700.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				26.033.603,00		29.000.000,00		30.500.000,00		32.000.000,00		33.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	26.033.603,00	6	29.000.000,00	6	30.500.000,00	6	32.000.000,00	6	33.500.000,00		
1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6.311.226,00		7.000.000,00		7.500.000,00		7.800.000,00		8.200.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6	6.311.226,00	6	7.000.000,00	6	7.500.000,00	6	7.800.000,00	6	8.200.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.730.000,00		12.500.000,00		13.100.000,00		13.500.000,00		14.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	4.730.000,00	5	12.500.000,00	5	13.100.000,00	5	13.500.000,00	5	14.000.000,00		
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.250.256.691,00		4.556.557.883,00		4.611.850.202,00		4.760.434.897,00		4.756.174.363,00		
Terselenggaranya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23	31	4.250.256.691,00	31	4.556.557.883,00	31	4.611.850.202,00	31	4.760.434.897,00	31	4.756.174.363,00		
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.250.256.691,00		4.556.557.883,00		4.611.850.202,00		4.760.434.897,00		4.756.174.363,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23	31	4.250.256.691,00	31	4.556.557.883,00	31	4.611.850.202,00	31	4.760.434.897,00	31	4.756.174.363,00		
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				268.898.680,00		440.844.117,00		588.626.798,00		727.096.103,00		790.000.000,00		
Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	2	268.898.680,00	2	440.844.117,00	2	588.626.798,00	2	727.096.103,00	2	790.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	30		40		45		55		55			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				10.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		23.000.000,00		25.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.000.000,00	1	23.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.000.000,00		43.000.000,00		45.000.000,00		48.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	3	35.000.000,00	3	43.000.000,00	3	45.000.000,00	3	48.000.000,00	3	50.000.000,00		
1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				31.332.762,00		24.344.117,00		72.000.000,00		74.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	2	31.332.762,00	2	24.344.117,00	2	72.000.000,00	2	74.000.000,00	2	75.000.000,00		
1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.674.040,00		53.000.000,00		55.000.000,00		58.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	40.674.040,00	3	53.000.000,00	3	55.000.000,00	3	58.000.000,00	3	60.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				22.330.013,00		22.500.000,00		26.500.000,00		29.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	22.330.013,00	3	22.500.000,00	3	26.500.000,00	3	29.000.000,00	3	30.000.000,00		
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				122.136.865,00		180.000.000,00		200.000.000,00		245.096.103,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	30	122.136.865,00	40	180.000.000,00	45	200.000.000,00	55	245.096.103,00	55	250.000.000,00		
1.06.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				7.425.000,00		100.000.000,00		170.126.798,00		250.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	7.425.000,00	1	100.000.000,00	1	170.126.798,00	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00		
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan				886.951.800,00		890.860.000,00		893.860.000,00		897.860.000,00		900.860.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemerintahan Daerah														
Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	5	886.951.800,00	5	890.860.000,00	5	893.860.000,00	5	897.860.000,00	5	900.860.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	29	30		30		30		30		30			
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				33.091.800,00		37.000.000,00		40.000.000,00		44.000.000,00		47.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	5	33.091.800,00	5	37.000.000,00	5	40.000.000,00	5	44.000.000,00	5	47.000.000,00		
1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				853.860.000,00		853.860.000,00		853.860.000,00		853.860.000,00		853.860.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	29	30	853.860.000,00	30	853.860.000,00	30	853.860.000,00	30	853.860.000,00	30	853.860.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				250.150.000,00		345.000.000,00		367.000.000,00		400.000.000,00		544.733.637,00		
Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	45	250.150.000,00	55	345.000.000,00	60	367.000.000,00	55	400.000.000,00	55	544.733.637,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	9		9		10		10		10			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				90.000.000,00		100.000.000,00		112.000.000,00		138.000.000,00		164.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	9	9	90.000.000,00	9	100.000.000,00	10	112.000.000,00	10	138.000.000,00	10	164.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)													
1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.150.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	45	10.150.000,00	55	20.000.000,00	60	25.000.000,00	55	30.000.000,00	55	30.000.000,00		
1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000,00		225.000.000,00		230.000.000,00		232.000.000,00		350.733.637,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	150.000.000,00	1	225.000.000,00	1	230.000.000,00	1	232.000.000,00	1	350.733.637,00		
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				2.948.508.000,00		3.035.954.000,00		3.147.438.000,00		3.305.116.000,00		3.406.017.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan sosial bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	2,03	9,33	2.948.508.000,00	13,39	3.035.954.000,00	16,23	3.147.438.000,00	20,28	3.305.116.000,00	26,37	3.406.017.000,00	1.06.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS SOSIAL	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi dalam Pelayanan Sosial (%)	4,94	28,4		34,57		40,74		46,91		53,09			
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang memiliki sertifikasi (%)	1,22	9,33		17,44		24,34		32,45		40,57			
1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		
Terselenggaranya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	0	0	0,00	4	60.000.000,00	5	65.000.000,00	5	65.000.000,00	6	70.000.000,00		
1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				0,00		60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	0	0	0,00	4	60.000.000,00	5	65.000.000,00	5	65.000.000,00	6	70.000.000,00		
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				2.948.508.000,00		2.975.954.000,00		3.082.438.000,00		3.240.116.000,00		3.336.017.000,00		
Terselenggaranya Pengembangan Kapasitas bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)	58	58	2.948.508.000,00	86	2.975.954.000,00	120	3.082.438.000,00	160	3.240.116.000,00	200	3.336.017.000,00		
	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	13	13		13		13		13		13			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	80	81		81		81		81		81			
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				2.320.808.000,00		2.325.954.000,00		2.397.438.000,00		2.540.116.000,00		2.611.017.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	80	81	2.320.808.000,00	81	2.325.954.000,00	81	2.397.438.000,00	81	2.540.116.000,00	81	2.611.017.000,00		
1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				78.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00		
Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam	13	13	78.000.000,00	13	100.000.000,00	13	110.000.000,00	13	120.000.000,00	13	125.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kabupaten/Kota	penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)													
1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota				11.730.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	0	10	11.730.000,00	20	25.000.000,00	20	25.000.000,00	25	30.000.000,00	30	35.000.000,00		
1.06.02.2.03.0017 - Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				549.700.000,00		550.000.000,00		575.000.000,00		580.000.000,00		600.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	58	58	549.700.000,00	86	550.000.000,00	120	575.000.000,00	160	580.000.000,00	200	600.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(orang)													
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				532.000.000,00		128.199.000,00		132.907.000,00		139.565.000,00		143.826.000,00		
Meningkatnya penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (%)	100	100	532.000.000,00	100	128.199.000,00	100	132.907.000,00	100	139.565.000,00	100	143.826.000,00	1.06.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS SOSIAL	
	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	50	50		60		70		80		90			
1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				532.000.000,00		128.199.000,00		132.907.000,00		139.565.000,00		143.826.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya fasilitasi bagi Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan dan tertangani	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	-	20	532.000.000,00	30	128.199.000,00	40	132.907.000,00	50	139.565.000,00	60	143.826.000,00		
1.06.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				532.000.000,00		128.199.000,00		132.907.000,00		139.565.000,00		143.826.000,00		
Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	-	20	532.000.000,00	30	128.199.000,00	40	132.907.000,00	50	139.565.000,00	60	143.826.000,00		
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				4.963.709.000,00		5.110.921.000,00		5.298.601.000,00		5.564.045.000,00		5.733.909.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Indeks (Skala 0-100))	72	74	4.963.709.000,00	76	5.110.921.000,00	78	5.298.601.000,00	80	5.564.045.000,00	82	5.733.909.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	100	49		51		52		53		54			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Indeks (Skala 0-100))	70	72		74		76		78		80			
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				4.736.555.000,00		4.859.401.000,00		4.999.406.000,00		5.194.515.000,00		5.291.556.000,00		
Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	16	25	4.736.555.000,00	30	4.859.401.000,00	35	4.999.406.000,00	40	5.194.515.000,00	45	5.291.556.000,00		
	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	67	110		120		130		140		150			
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan	27.283	17.500		17.600		17.650		17.700		17.750			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kabupaten/Kota (Orang)													
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	27	30		35		40		45		50			
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	58	80		85		90		95		100			
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu				191.558.500,00		264.500.000,00		322.176.000,00		395.000.000,00		452.500.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	27	30	191.558.500,00	35	264.500.000,00	40	322.176.000,00	45	395.000.000,00	50	452.500.000,00		
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				4.401.945.000,00		4.442.000.000,00		4.464.000.000,00		4.486.000.000,00		4.508.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	27.283	17.500	4.401.945.000,00	17.600	4.442.000.000,00	17.650	4.464.000.000,00	17.700	4.486.000.000,00	17.750	4.508.000.000,00		
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				44.921.000,00		54.701.000,00		65.980.000,00		96.290.000,00		102.656.000,00		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	67	110	44.921.000,00	120	54.701.000,00	130	65.980.000,00	140	96.290.000,00	150	102.656.000,00		
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				42.896.000,00		35.700.000,00		61.000.000,00		97.000.000,00		104.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	16	25	42.896.000,00	30	35.700.000,00	35	61.000.000,00	40	97.000.000,00	45	104.000.000,00		
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan				55.234.500,00		62.500.000,00		86.250.000,00		120.225.000,00		124.400.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	58	80	55.234.500,00	85	62.500.000,00	90	86.250.000,00	95	120.225.000,00	100	124.400.000,00		
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				227.154.000,00		251.520.000,00		299.195.000,00		369.530.000,00		442.353.000,00		
Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	206	55	227.154.000,00	60	251.520.000,00	65	299.195.000,00	70	369.530.000,00	75	442.353.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	201	110		120		130		140		150			
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	172	80		85		90		95		100			
1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan				100.000.000,00		110.000.000,00		136.700.000,00		150.400.000,00		190.500.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	201	110	100.000.000,00	120	110.000.000,00	130	136.700.000,00	140	150.400.000,00	150	190.500.000,00		
1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				55.014.000,00		60.520.000,00		76.695.000,00		103.230.000,00		130.553.000,00		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	206	55	55.014.000,00	60	60.520.000,00	65	76.695.000,00	70	103.230.000,00	75	130.553.000,00		
1.06.04.2.02.0013 - Pemberian Layanan				72.140.000,00		81.000.000,00		85.800.000,00		115.900.000,00		121.300.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Rujukan														
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	172	80	72.140.000,00	85	81.000.000,00	90	85.800.000,00	95	115.900.000,00	100	121.300.000,00		
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				10.664.905.000,00		10.981.201.000,00		11.384.446.000,00		11.954.773.000,00		12.319.738.000,00		
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi Fakir Miskin	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)	0,29	0,68	10.664.905.000,00	0,96	10.981.201.000,00	1,23	11.384.446.000,00	1,51	11.954.773.000,00	1,78	12.319.738.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
	Indikator Persentase Penerima Manfaat yang diberikan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase penyaluran perlindungan sosial sektoral (%)	2	3,18		3,57		4,07		4,39		4,62			
	Persentase penerima manfaat yang diberikan perlindungan dan jaminan sosial sektor pendidikan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase penyaluran perlindungan sosial	35,87	37		38		39		40		41			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	sektor pangan (%)													
	Persentase Desa dan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan fakir miskin (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase penerima manfaat yang diberikan perlindungan dan jaminan sosial sektor kesehatan (%)	86,36	87,28		88,21		89,14		90,07		91			
1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				100.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		
Terselenggaranya Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar di Panti Asuhan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	35	8	100.000.000,00	10	120.000.000,00	11	130.000.000,00	12	140.000.000,00	13	150.000.000,00		
1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar				100.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	35	90	100.000.000,00	100	120.000.000,00	110	130.000.000,00	115	140.000.000,00	120	150.000.000,00		
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah				10.564.905.000,00		10.861.201.000,00		11.254.446.000,00		11.814.773.000,00		12.169.738.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kabupaten/Kota														
Terselenggaranya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	4.220	4.645	10.564.905.000,00	4.670	10.861.201.000,00	4.750	11.254.446.000,00	4.850	11.814.773.000,00	4.925	12.169.738.000,00		
	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	539.697	549.000		559.000		569.000		579.000		589.000			
	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	30.072	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				52.793.000,00		66.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	539.697	549.000	52.793.000,00	559.000	66.000.000,00	569.000	65.000.000,00	579.000	70.000.000,00	589.000	75.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	10	200.000.000,00	12	250.000.000,00	15	300.000.000,00	17	350.000.000,00	20	400.000.000,00		
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				10.269.618.000,00		10.500.582.000,00		10.842.596.000,00		11.345.581.400,00		11.642.738.000,00		
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	4.220	4.545	10.269.618.000,00	4.670	10.500.582.000,00	4.750	10.842.596.000,00	4.850	11.345.581.400,00	4.925	11.642.738.000,00		
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				42.494.000,00		44.619.000,00		46.850.000,00		49.191.600,00		52.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	30.072	5.000	42.494.000,00	5.000	44.619.000,00	5.000	46.850.000,00	5.000	49.191.600,00	5.000	52.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				432.717.000,00		445.551.000,00		461.912.000,00		485.053.000,00		499.861.000,00		
Meningkatnya penanganan bencana bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	49,53	61,61	432.717.000,00	72,14	445.551.000,00	80,19	461.912.000,00	83,9	485.053.000,00	87	499.861.000,00	1.06.0.00.0.00. 01.0000 - DINAS SOSIAL	
	Persentase Korban Bencana yg Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	25,56	30,82		33,68		39,9		41,8		43,41			
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya (%)	24,28	31,57		37,59		40,29		42,1		43,6			
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				216.717.000,00		229.551.000,00		245.912.000,00		250.053.000,00		264.861.000,00		
Terselenggaranya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	152	100	216.717.000,00	100	229.551.000,00	110	245.912.000,00	110	250.053.000,00	120	264.861.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	6.750	2.500		2.600		2.700		2.750		2.850			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30	49		50		50		55		55			
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan				151.762.160,00		162.551.000,00		177.912.000,00		174.053.000,00		186.861.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	6.750	2.500	151.762.160,00	2.600	162.551.000,00	2.700	177.912.000,00	2.750	174.053.000,00	2.850	186.861.000,00		
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				40.800.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan	30	49	40.800.000,00	50	42.000.000,00	50	42.000.000,00	55	50.000.000,00	55	50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota (Orang)													
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial				24.154.840,00		25.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00		28.000.000,00		
Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	152	100	24.154.840,00	100	25.000.000,00	110	26.000.000,00	110	26.000.000,00	120	28.000.000,00		
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				216.000.000,00		216.000.000,00		216.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		
Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	38	37	216.000.000,00	37	216.000.000,00	37	216.000.000,00	37	235.000.000,00	37	235.000.000,00		
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				216.000.000,00		216.000.000,00		216.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	38	37	216.000.000,00	37	216.000.000,00	37	216.000.000,00	37	235.000.000,00	37	235.000.000,00		
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				198.194.000,00		204.072.000,00		211.566.000,00		222.165.000,00		228.947.000,00		
Terwujudnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik (%)	100	100	198.194.000,00	100	204.072.000,00	100	211.566.000,00	100	222.165.000,00	100	228.947.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				198.194.000,00		204.072.000,00		211.566.000,00		222.165.000,00		228.947.000,00		
Terselenggaranya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	11	198.194.000,00	11	204.072.000,00	11	211.566.000,00	11	222.165.000,00	11	228.947.000,00		
	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	11	11		11		11		11		11			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Makam)													
1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				23.646.878,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	11	23.646.878,00	11	25.000.000,00	11	30.000.000,00	11	35.000.000,00	11	35.000.000,00		
1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				174.547.122,00		179.072.000,00		181.566.000,00		187.165.000,00		193.947.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	11	11	174.547.122,00	11	179.072.000,00	11	181.566.000,00	11	187.165.000,00	11	193.947.000,00		

Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang menandai berakhirnya periode kepemimpinan kepala daerah sekaligus menjadi awal tanggung jawab Kepala Daerah berikutnya. Dalam perencanaan pembangunan daerah, Tahun 2030 memiliki posisi strategis sebagai jembatan kesinambungan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah agar tidak terjadi kekosongan perencanaan akibat pergantian kepemimpinan. Program dan target kinerja Tahun 2030 dirumuskan secara sistematis dengan memperhatikan konsistensi terhadap visi, misi, serta sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sekaligus untuk mendukung capaian prioritas pembangunan daerah jangka panjang menengah berikutnya. Dengan demikian program Tahun 2030 tidak hanya sebagai penutup Rencana Strategis periode berjalan, tetapi juga sebagai pedoman transisi menuju Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2030-2034.

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik serta pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Daerah Nawakarsa, Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk menjawab isu-isu strategis daerah, terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial, pengurangan kemiskinan, serta penguatan perlindungan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

Nawa Karsa atau 9 (sembilan) navigasi perubahan merupakan sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dituangkan dalam Visi-Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Dinas Sosial mengampu Program Prioritas Daerah Nawakarsa

Gresik Seger Sejahtera, Bahagia dan Berdikari dengan Sub Navigasi Gresik Santri, Bantuan Operasional Panti Kesejahteraan Sosial, Bumi Gresik (Peduli Buruh Migran Gresik) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif. Program-program ini diselaraskan dengan visi dan misi daerah, serta digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran dan pedoman pelaksanaan program oleh berbagai instansi pemerintah daerah. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, memenuhi kebutuhan dasar, dan menyediakan layanan publik yang lebih baik dan mengatasi kesenjangan pembangunan yang ada, baik itu kesenjangan geografis maupun kesenjangan dalam akses terhadap layanan dasar. Secara rinci keselarasan antara Program kegiatan pada Renstra Dinas Sosial dengan Nawakarsa dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas Nawakarsa			Keterangan	Outcome	Nomenklatur Program Pembangunan	Kegiatan	Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Navigasi	No	Sub Navigasi						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1	Gresik Seger Sejahtera, Bahagia, dan Berdikari		Gresik Santri	Program santunan kehormatan untuk guru ngaji, marbot dan penjaga makam	Terlaksananya pemberdayaan dan santunan kehormatan bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	81	2.309.078.000	81	2.300.954.000	81	2.372.438.000	81	2.510.116.000	81	2.576.017.000	Dinas Sosial
2	Gresik Seger Sejahtera, Bahagia, dan Berdikari		Bantuan Operasional Panti Kesejahteraan Sosial	Program bantuan operasional yang berfokus pada panti jompo, napza	Terlaksananya pemberdayaan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota											
3	Gresik Seger Sejahtera, Bahagia, dan Berdikari		Bumi Gresik (Peduli Buruh Migran Gresik)	Program kepedulian terhadap buruh migran asli Kabupaten Gresik	Terlaksananya penanganan warga negara migran	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	1.06.03.2.01.0003 - Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	20	532.000.000	30	128.199.000	40	132.907.000	50	139.565.000	60	143.826.000	Dinas Sosial

No	Program Prioritas Nawakarsa			Keterangan	Outcome	Nomenklatur Program Pembangunan	Kegiatan	Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Navigasi	No	Sub Navigasi						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
4	Gresik Seger Sejahtera, Bahagia, dan Berdikari		Bumi Gresik (Peduli Buruh Migran Gresik)	Program kepedulian terhadap buruh migran asli Kabupaten Gresik	Terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial bagi warga negara migran	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	8	100.000.000	10	120.000.000	11	130.000.000	12	140.000.000	13	150.000.000	Dinas Sosial
5	Gresik Seger Sejahtera, Bahagia, dan Berdikari		Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif	Perluasan bantuan sosial pada lansia dan perempuan kepala keluarga	Terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial bagi lansia dan perempuan kepala keluarga	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4.545	10.269.618.000	4.670	10.500.582.000	4.750	10.842.596.000	4.850	11.345.581.400	4.925	11.642.738.000	Dinas Sosial

4.4 Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) sangatlah beragam dan tersebar di berbagai sektor kementerian/lembaga. RPJMN 2025–2029 bertujuan meletakkan fondasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mewujudkan keselarasan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional, penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2026–2030 dilakukan dengan memperhatikan dokumen RPJMN 2025–2029. RPJMN tersebut memuat Asta Cita Presiden yang dijabarkan ke dalam 17 Prioritas Nasional, 83 Kegiatan Prioritas Utama, serta Proyek Prioritas Nasional yang menjadi pedoman pembangunan jangka menengah. Secara rinci keselarasan antara Program kegiatan pada Renstra Dinas Sosial dengan Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 6											
Kegiatan Prioritas Utama : Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan											
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	37	216.000.000	37	216.000.000	37	216.000.000	37	235.000.000	37	235.000.000	Dinas Sosial
Penyediaan Makanan	2.500	151.762.160	2.600	162.551.000	2.700	177.912.000	2.750	174.053.000	2.850	186.861.000	Dinas Sosial
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	49	40.800.000	50	42.000.000	50	42.000.000	55	50.000.000	55	50.000.000	Dinas Sosial
Pelayanan Dukungan Psikososial	100	24.154.840	100	25.000.000	110	26.000.000	110	26.000.000	120	28.000.000	Dinas Sosial
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	11	23.646.878	11	25.000.000	11	30.000.000	11	35.000.000	11	35.000.000	Dinas Sosial
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	11	174.547.122	11	179.072.000	11	181.566.000	11	187.165.000	11	193.947.000	Dinas Sosial
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	8	100.000.000	10	120.000.000,00	11	130.000.000,00	12	140.000.000,00	13	150.000.000,00	Dinas Sosial
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	549.000	52.793.000	559.000	66.000.000	569.000	65.000.000	579.000	70.000.000	589.000	75.000.000	Dinas Sosial

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	10	200.000.000	12	250.000.000	15	300.000.000	17	350.000.000	20	400.000.000	Dinas Sosial
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4.545	10.269.618.000	4.670	10.500.582.000	4.750	10.842.596.000	4.850	11.345.581.400	4.925	11.642.738.000	Dinas Sosial
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.000	42.494.000	5.000	44.619.000	5.000	46.850.000	5.000	49.191.600	5.000	52.000.000	Dinas Sosial
Penyediaan Alat Bantu	30	191.558.500	35	264.500.000	40	322.176.000	45	395.000.000	50	452.500.000	Dinas Sosial
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	17.500	4.401.945.000	17.600	4.442.000.000	17.650	4.464.000.000	17.700	4.486.000.000	17.750	4.508.000.000	Dinas Sosial
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	110	44.921.000	120	54.701.000	130	65.980.000	140	96.290.000	150	102.656.000	Dinas Sosial
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	25	42.896.000,00	30	35.700.000	35	61.000.000	40	97.000.000	45	104.000.000	Dinas Sosial
Pemberian Layanan Rujukan	80	55.234.500	85	62.500.000	90	86.250.000	95	120.225.000	100	124.400.000	Dinas Sosial
Pemberian Layanan Kedaruratan	110	100.000.000	120	110.000.000	130	136.700.000	140	150.400.000	150	190.500.000	Dinas Sosial
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	55	55.014.000	60	60.520.000	65	76.695.000	70	103.230.000	75	130.553.000	Dinas Sosial
Pemberian Layanan Rujukan	80	72.140.000	85	81.000.000	90	85.800.000	95	115.900.000	100	121.300.000	Dinas Sosial
Kegiatan Prioritas Utama : Pengembangan											

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Ekonomi Perawatan (Care Economy)											
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	81	2.309.078.000	81	2.300.954.000	81	2.372.438.000	81	2.510.116.000	81	2.576.017.000	Dinas Sosial
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	13	78.000.000	13	100.000.000	13	110.000.000	13	120.000.000	13	125.000.000	Dinas Sosial
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	11.730.000	20	25.000.000	20	25.000.000	25	30.000.000	30	35.000.000	Dinas Sosial
Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	58	549.700.000	86	550.000.000	120	575.000.000	160	580.000.000	200	600.000.000	Dinas Sosial

4.5 Subkegiatan yang mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Selain Prioritas Nasional, RPJMN 2025–2029 juga menetapkan Program Strategis yang dijabarkan dalam Proyek Prioritas Nasional (ProPN). Proyek ini bersifat konkret, terukur, dan menjadi lokomotif utama pencapaian target pembangunan nasional. Hubungan ini digambarkan pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5
Subkegiatan yang mendukung Proyek Prioritas Nasional
dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Proyek Prioritas Nasional / Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Tidak Terdapat Proyek Strategis Nasional											

4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Asta Cita Presiden merupakan delapan misi utama pembangunan yang menjadi pijakan RPJMN 2025–2029. Setiap Asta Cita memiliki outcome prioritas yang ingin diwujudkan dalam periode lima tahun. Dinas Sosial Kabupaten Gresik sebagai pengelola pelayanan bidang sosial memberikan kontribusi nyata terhadap Asta Cita Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Keterkaitan ini ditunjukkan dalam tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Subkegiatan Dukungan Asta Cita
pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Asta Cita : Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan											
Outcome Prioritas : Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi Fakir Miskin											
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	8	100.000.000	10	120.000.000,00	11	130.000.000,00	12	140.000.000,00	13	150.000.000,00	Dinas Sosial
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	549.000	52.793.000	559.000	66.000.000	569.000	65.000.000	579.000	70.000.000	589.000	75.000.000	Dinas Sosial
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	10	200.000.000	12	250.000.000	15	300.000.000	17	350.000.000	20	400.000.000	Dinas Sosial
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4.545	10.269.618.000	4.670	10.500.582.000	4.750	10.842.596.000	4.850	11.345.581.400	4.925	11.642.738.000	Dinas Sosial
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.000	42.494.000	5.000	44.619.000	5.000	46.850.000	5.000	49.191.600	5.000	52.000.000	Dinas Sosial
Outcome Prioritas : Meningkatnya pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial											
Penyediaan Alat Bantu	30	191.558.500	35	264.500.000	40	322.176.000	45	395.000.000	50	452.500.000	Dinas Sosial
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	17.500	4.401.945.000	17.600	4.442.000.000	17.650	4.464.000.000	17.700	4.486.000.000	17.750	4.508.000.000	Dinas Sosial
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	110	44.921.000	120	54.701.000	130	65.980.000	140	96.290.000	150	102.656.000	Dinas Sosial
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	25	42.896.000,00	30	35.700.000	35	61.000.000	40	97.000.000	45	104.000.000	Dinas Sosial
Pemberian Layanan Rujukan	80	55.234.500	85	62.500.000	90	86.250.000	95	120.225.000	100	124.400.000	Dinas Sosial

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Pemberian Layanan Kedaruratan	110	100.000.000	120	110.000.000	130	136.700.000	140	150.400.000	150	190.500.000	Dinas Sosial
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	55	55.014.000	60	60.520.000	65	76.695.000	70	103.230.000	75	130.553.000	Dinas Sosial
Pemberian Layanan Rujukan	80	72.140.000	85	81.000.000	90	85.800.000	95	115.900.000	100	121.300.000	Dinas Sosial
Outcome Prioritas : Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana											
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	37	216.000.000	37	216.000.000	37	216.000.000	37	235.000.000	37	235.000.000	Dinas Sosial
Penyediaan Makanan	2.500	151.762.160	2.600	162.551.000	2.700	177.912.000	2.750	174.053.000	2.850	186.861.000	Dinas Sosial
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	49	40.800.000	50	42.000.000	50	42.000.000	55	50.000.000	55	50.000.000	Dinas Sosial
Pelayanan Dukungan Psikososial	100	24.154.840	100	25.000.000	110	26.000.000	110	26.000.000	120	28.000.000	Dinas Sosial

4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Daerah, Dinas Sosial Kabupaten Gresik menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur kinerja yang terukur dan akuntabel. IKU ini mencerminkan peran strategis Dinas Sosial dalam optimalisasi layanan pada bidang sosial. Penetapan target tahunan pada masing-masing indikator disusun secara realistis dan terarah untuk periode 2025–2030. Daftar Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Gresik beserta target capaian tahunan yang menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 4.7.1 berikut:

Tabel 4.7.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Kabupaten Gresik

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AWAL TAHUN 2025	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR 2030
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks inklusi (GEDSI) (Indeks)		56,2	60	64	68	72	76	80	80
2	Rasio Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin (%)	Persen (%)	80	80-95	80-95	85-95	90-95	95-100	95-100	95-100
3	Rasio gini (Angka)	1-0 (burden)	0,33	0.311-0.351	0.303-0.343	0.295-0.335	0.287-0.327	0.279-0.319	0,271 - 0,311	0,271 - 0,311
4	Persentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan (%)	Persen (%)	28	28	37	45	53	60	67	67
5	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial sektoral (%)	Persen (%)	3	n/a	3	5	7	8	8	8

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AWAL TAHUN 2025	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR 2030
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Persentase penyandang disabilitas yang mendapat Program Perlindungan Sosial (%)	Persen (%)	15	16	27	29	38	48	57	57
7	Persentase Lansia Miskin yang mendapat Program Perlindungan Sosial (%)	Persen (%)	18	22	30	37	43	50	57	57
8	Persentase Desil 1-2 dibandingkan dengan jumlah penduduk (%)	Persen (%)	21	20	19	18	17	16	15	15

Indikator Kinerja Daerah merupakan tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Gresik. Indikator ini disusun secara terukur dengan memperhatikan baseline Tahun 2024 serta target tahunan hingga Tahun 2030, sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah. Rincian Indikator Kinerja Daerah selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.7.2 berikut:

Tabel 4.7.2
Indikator Kinerja Daerah
Dinas Sosial Kabupaten Gresik

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Indeks (Skala 0-100)	72	72	74	76	78	80	82	
2	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	%	0,29	0,34	0,68	0,96	1,23	1,51	1,78	
5	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	Persentase	2,03	5,68	9,33	13,39	16,23	20,28	26,37	
6	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
8	Indikator Persentase Penerima Manfaat yang diberikan Perlindungan dan	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Jaminan Sosial									
9	Persentase penyaluran perlindungan sosial sektoral	%	2	2	3,18	3,57	4,07	4,39	4,62	
10	Persentase Korban Bencana yg Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	%	25,56	30,07	30,82	33,68	39,9	41,8	43,41	
11	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi dalam Pelayanan Sosial	%	4,94	17,28	28,4	34,57	40,74	46,91	53,09	
12	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Indeks (Skala 0-100)	70	70	72	74	76	78	80	
13	Persentase Desa dan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan fakir miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persentase	100	48	49	51	52	53	54	
15	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	49,53	59,75	61,61	72,14	80,19	83,9	87	
16	Persentase penerima manfaat yang diberikan perlindungan dan jaminan sosial sektor kesehatan	%	86,36	87	87,28	88,21	89,14	90,07	91	
17	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase ketercapaian sasaran program	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	OPD									
19	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	%	24,28	29,77	31,57	37,59	40,29	42,1	43,6	
20	Persentase penyaluran perlindungan sosial sektor pangan	%	35,87	36	37	38	39	40	41	
21	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang memiliki sertifikasi	%	1,22	2,43	9,33	17,44	24,34	32,45	40,57	
22	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Persentase	50	0	50	60	70	80	90	
23	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	%	100	100	100	100	100	100	100	
24	Persentase penerima manfaat yang diberikan perlindungan dan jaminan sosial sektor pendidikan	%	100	100	100	100	100	100	100	

4.8 Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD

Sebagai pelengkap dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Sosial Kabupaten Gresik juga menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berfungsi untuk mengukur aspek-aspek teknis dan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Indikator ini merefleksikan konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial secara efisien, efektif, dan akuntabel, khususnya dalam pelayanan bidang kesehatan. Daftar Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Kabupaten

Gresik beserta target capaian tahunan untuk periode 2025–2030 dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Sosial Kabupaten Gresik

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AWAL TAHUN 2025	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR 2030	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.4	Kinerja setiap urusan pemerintah daerah										
4.4.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Dasar										
4.4.1.6	Sosial										
	Persentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan (%)	Persen (%)	28	28	37	45	53	60	67	67	Sasaran Renstra
	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial sektoral (%)	Persen (%)	3	n/a	3	5	7	8	8	8	Sasaran Renstra
	Persentase penyandang disabilitas yang mendapat Program Perlindungan Sosial (%)	Persen (%)	15	16	27	29	38	48	57	57	Sasaran Renstra
	Persentase Lansia Miskin yang mendapat Program Perlindungan Sosial (%)	Persen (%)	18	22	30	37	43	50	57	57	Sasaran Renstra
	Persentase Desil 1-2 dibandingkan dengan jumlah penduduk (%)	Persen (%)	21	20	19	18	17	16	15	15	Sasaran Renstra

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis merupakan upaya memberikan arahan dalam menyusun perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2025-2029. Perencanaan ini disusun berdasarkan program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang secara tepat dan berkelanjutan. Sebagai implementasi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dengan tujuan Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial akan mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu Meningkatkan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh kelompok rentan, Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan perlindungan sosial dan inklusi sosial bagi kelompok rentan dan marginal dan Mewujudkan pengurangan ketimpangan.

Sasaran, strategi dan arah kebijakan tersebut beserta indikator sasaran menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Gresik dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan bidang urusan sosial di Kabupaten Gresik. Renstra ini disusun berdasarkan data/informasi kegiatan bidang-bidang dan diskusi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) agar dapat menjadi pedoman dalam perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Gresik selama lima tahun ke depan (2025-2029). Oleh karena itu, Rencana Strategis ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan melalui Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

Selain itu, dengan memperhatikan kondisi serta permasalahan, maka Rencana Strategis ini bersifat fleksibel, yang memungkinkan adanya perubahan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan.

Melalui Renstra Tahun 2025-2029 diharapkan mampu mempertegas peran dan posisi Dinas Sosial Kabupaten Gresik dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Keberhasilan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan sangat ditentukan oleh: (a) komitmen pimpinan, (b) konsistensi kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Gresik, (c) kepedulian dan peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha.